



PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO

# LAPORAN KINERJA

**Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Mojokerto**

Tahun 2022



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Dasar pembentukan dan tupoksi Satpol PP dapat dijelaskan di Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat kemudian dipertegas lagi bahwa satpol pp juga memiliki jabatan fungsional serta dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggar perda yang telah disahkan oleh Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 256 dan pasal 257.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.

## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Termuat dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

### A. Kepala Satuan

Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melaksanakan urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan.

### B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
4. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
5. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

#### B.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;



- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### C. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan



kepada masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;

2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
3. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
5. Pelaksanaan fasilitasi penindakan nonyustisial dan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
6. Pelaksanaan monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

C.1 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan tentang perundang-undangan daerah;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyusun bahan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pengembangan prasarana dan sarana penyuluhan;
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan dalam rangka cegah dini adanya pelanggaran perundang-undangan daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

C.2 Seksi Penindakan mempunyai tugas :



- a. menyusun rencana program penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
- b. melakukan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- c. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- d. melakukan fasilitasi proses penindakan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- e. melakukan fasilitasi proses persidangan pelanggar perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengelolaan dan mengkoordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

#### D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dan mempunyai fungsi :

1. perumusan program kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. pelaksanaan fasilitasi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. pelaksanaan pengawasan dan monitoring dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

D.1 Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melakukan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. melakukan cegah dini melalui patroli wilayah;
- f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. melakukan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain dalam kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

D.2 Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pengamanan dan pengawalan;
- b. melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pejabat daerah dan aset-aset daerah lainnya;
- d. melakukan pengamanan dan pengawalan kunjungan kerja pejabat daerah dan tamu VVIP/VIP lainnya;
- e. melakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa bersama pihak terkait;
- f. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan upacara dan/atau apel/gelar pasukan serta pengamanannya;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

#### E. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan satuan perlindungan masyarakat, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
2. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
4. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

#### E.1 Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pendataan dan pembinaan SATLINMAS;
- b. melakukan pendataan dan analisa data potensi SATLINMAS;
- c. menyusun bahan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan SATLINMAS;
- d. melakukan identifikasi dan mengusulkan pemenuhan sarana prasarana SATLINMAS;
- e. menyusun kebutuhan SATLINMAS dalam pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;

- f. melakukan pembekalan teknis SATLINMAS dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES bersama pihak terkait;
- g. melakukan pendidikan dan latihan dasar SATLINMAS;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

#### E.2 Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat ;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi dan pelatihan pemberdayaan potensi masyarakat dalam pengamanan swakarsa;
- e. melakukan peningkatan peranserta, prakarsa serta pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat atau perlindungan masyarakat;
- f. melakukan peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat ;
- g. melakukan pengerahan perlindungan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat bencana;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

#### F. Kelompok Jabatan Fungsional

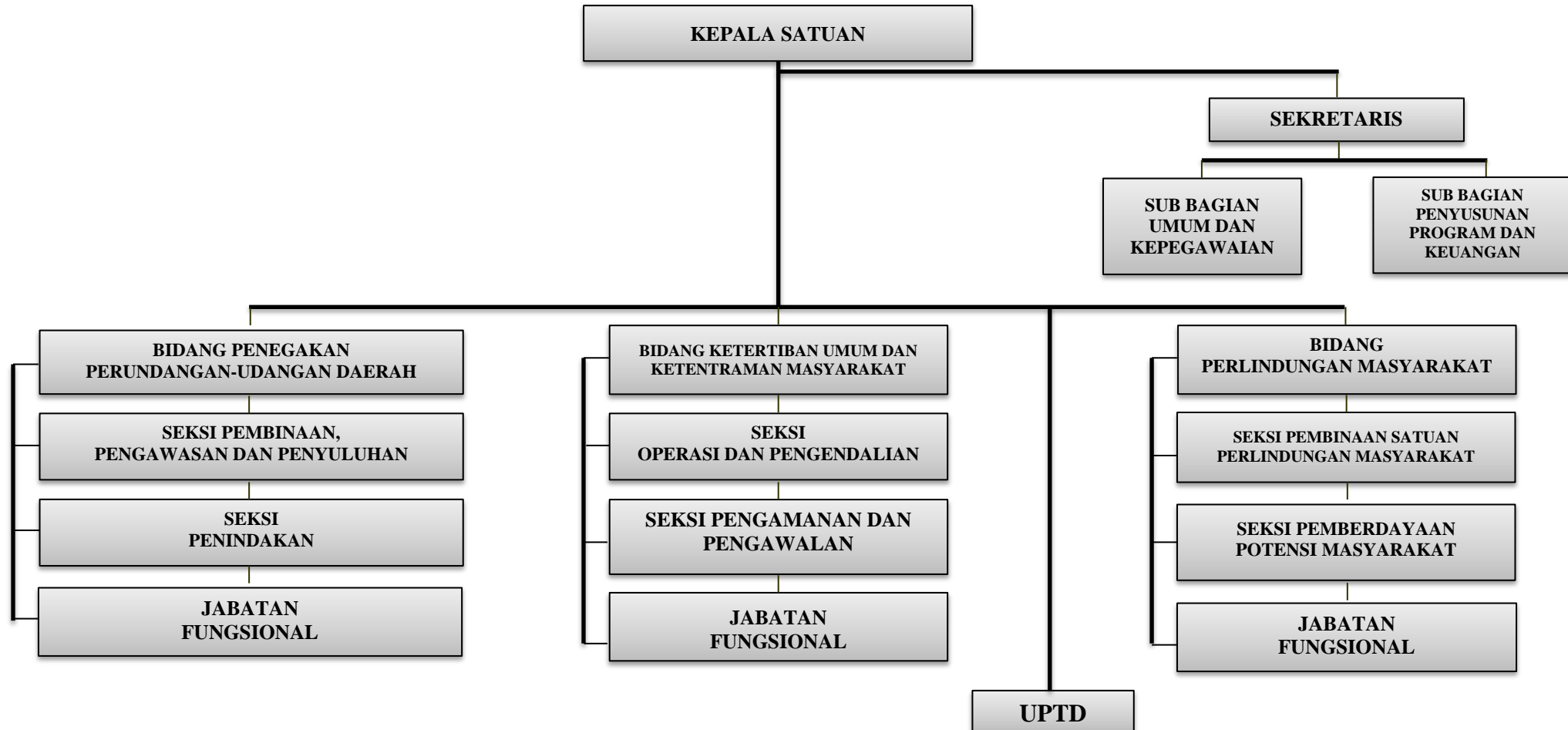
1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, ketrampilan dan kebutuhan;
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;



3. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator.



### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



### I.3 PERAN DAN ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilakukan melalui :

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
3. Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
4. Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa; dan
5. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan baik secara teknis dan non teknis.

Aspek strategis organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mencakup :

1. Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja yang sejalan dengan visi Bupati Mojokerto yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** maka dari 4 (empat) misi Bupati Mojokerto yang pertama yaitu **“Mewujudkan SDM yang sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan”** Sasaran Kepala daerah merupakan Tujuan Perangkat Daerah sedangkan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Meningkatnya Penanganan Konflik Keagamaan dan Memperkuat Kerangka Regulasi bagi Kerukunan** agar tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Rencana Strategis yaitu :

1. Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan arah kebijakan menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban dengan arah kebijakan pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib.

### 2.2 PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian



keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Sebagai wujud kesungguhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan perjanjian kinerja yang ditandatangani bersama antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bupati Mojokerto.

### 2.2.1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	90%
		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	90%
		Persentase keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	90%
2	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	90%
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	87%
		Indeks profesionalitas ASN	73,05
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,4 (A)
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi

No	Program	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 8.060.622.338,-	PAPBD 2022
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.841.708.177,-	PAPBD 2022
<b>Total Anggaran Tahun 2022</b>		<b>Rp. 17.902.330.515,-</b>	



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dihitung berdasarkan penetapan Indikator Kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung persentase pencapaian target masing-masing indikator kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang akan dicapai. Pengukuran kinerja ini menggunakan Formula Pengukuran Kinerja. Formula pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1  
FORMULA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022**

SASARAN	IKU	FORMULA PENGUKURAN
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda/Perkada yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada Tahun N} \times 100\%}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani Tahun N}}$
	Persentase penanganan gangguan tramtibum yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun N} \times 100\%}{\text{Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan Tahun N}}$
	Persentase keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Satpol PP/Satlinmas yang ikutserta dalam penyelenggaraan tibuntranmas Tahun N} \times 100\%}{\text{Jumlah Satpol PP/Satlinmas pada Tahun N}}$

SASARAN	IKU	TARGET
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	<i>Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai</i>	90%
	<i>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</i>	87%
	<i>Indeks profesionalitas ASN</i>	73,05
	<i>Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	62
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	83,4 (A)



Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi
---	---	-----------

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda/Perkada yang tertangani	90 %	100 %	111%	-	-
	Persentase penanganan gangguan tramtibum yang terselesaikan	90 %	100%	111%	-	-
	Persentase keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	90 %	71,85%	79,8%	Tidak semua tahapan Pilkades mengikutsertakan Satlinmas tetapi untuk giat pembinaan dan pelatihan Satpol PP / Satlinmas karena kecukupan anggarannya terbatas untuk melibatkan Satpol PP / Satlinmas tidak bisa maksimal	Meningkatkan pembinaan dan pelatihan melalui simulasi terhadap anggota Satpol PP dan Satlinmas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	90%	50%	1 Rencana program yang sudah tersusun pelaksanaannya berbenturan dengan program kerja selain dari Perangkat Daerah	1 mengoptimalkan penyusunan rencana program dengan mempertimbangkan program kerja selain dari perangkat daerah
				2 Belum adanya kesamaan satuan pengukuran indikator	2 mengoptimalkan verifikasi terkait satuan pengukuran indikator



	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	87%	80,72%	1 Alokasi anggaran untuk pihak terkait penyerapannya belum sampai batas maksimal atau sesuai dengan anggaran yang tersedia 2 Alokasi anggaran DBHCHT pelaksanaannya pada Semester II dikarenakan menunggu PMK terbaru dan hasil koordinasi dengan Bea Cukai Pabean B Sidoarjo.	1	Mengoptimalkan rencana pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi mengusulkan kekurangan anggaran pada P-APBD
	Indeks profesionalitas ASN	73,05	67,41	1 Jenjang pendidikan sebagian besar personil masih belum sesuai dengan aturan yang ada di IP-ASN 2 Kurangnya kesadaran personil untuk mengikuti pengembangan kompetensi	1 2	1 Mendorong personil untuk mengembangkan jenjang pendidikan 2 Memberikan motivasi untuk giat mengikuti pendidikan dan pelatihan baik secara teknis maupun non teknis
	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62	67,27	-	-	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,4	80,76	1 data pendukung yang disampaikan sudah dicukupi akan tetapi pada IP ASN 2 masih rendah belum semua ASN menyusun laporan kinerja	1 2	1 Meningkatkan indeks IP ASN 2 Meningkatkan koordinasi intern dalam penyelesaian dokumen data pendukung
<b>Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah</b>	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi			

### **A.1 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Tertangani di Implementasikan dengan Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diimplementasikan dengan titik-titik rawan di berbagai wilayah Kabupaten Mojokerto yang berpotensi adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto. Adapun beberapa macam pelanggaran Peraturan Daerah yaitu :

- (1) Perusahaan/toko modern tanpa ijin atau masa ijinnya tidak berlaku
- (2) Reklame
- (3) Pedagang kaki lima
- (4) Warung remang-remang, minuman beralkohol dan pekerja seks komersial
- (5) Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan manusia silver
- (6) Operasi yustisi protokol kesehatan
- (7) Pita cukai rokok ilegal/pita cukai palsu

Data yang dihimpun selama Tahun 2022 untuk Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 diperoleh sebesar 100% membuktikan bahwa jumlah pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun n sebesar 161 kasus dan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani pada tahun n sebesar 161 kasus, melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan terhadap Perusahaan/toko modern tanpa ijin atau masa ijinnya tidak berlaku, penertiban reklame, penertiban Warung remang-remang, minuman beralkohol dan Pekerja Seks Komersial Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan manusia silver, Operasi yustisi protokol kesehatan dan Pita cukai rokok ilegal/pita cukai palsu serta pengaduan masyarakat melalui aplikasi (SIGAP) yang dianggarkan pada 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.780.000,- dengan target realisasi 66,89% silfa karena pelaksanaan kegiatan benturan dengan kegiatan dibidang cukai;
2. Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp 2.365.387.877,- realiasasi sebesar Rp. 1.724.141.639,- dengan target realisasi 72,89% silfa karena pelaksanaan kegiatan menunggu juknis dari PMK dan hasil koordinasi dengan Bea dan Cukai Tipe B Pabean Sidoarjo;
3. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan pagu anggaran Rp. 1.010.320.300,- dengan realisasi Rp. 429.078.892,- dengan realisasi target 42,47% silfa karena pelaksanaan kegiatan menunggu juknis dari PMK dan hasil koordinasi dengan Bea dan Cukai Tipe B Pabean Sidoarjo.

Persentase pelanggaran perda dan perkara Tahun N x 100%  
Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani N

$$\frac{161}{161} \times 100\% = 161\%$$

Adapun peta Kabupaten Mojokerto terkait titik-titik pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tergambar pada halaman 26.



Tabel 3.3

## DATA LOKASI PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA TAHUN 2022

NO	OBJEK PELANGGARAN PERDA	KUANTITAS	TANGGAL	LOKASI	JENIS PELANGGARAN	LANGKAH-LANGKAH	PROSES PENYELESAIAN
1.	REKLAME ILEGAL	1	21-01-2022	MOJOSARI	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
2	REKLAME ILEGAL	1	25-01-2022	BANGSAL DAN DLANGGU	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
3	REKLAME ILEGAL	1	17-02-2022	KEMLAGI	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
4	REKLAME ILEGAL	1	22-02-2022	SOOKO	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
5	REKLAME ILEGAL	1	24-03-2022	GEDEG	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
6	REKLAME ILEGAL	1	24-03-2022	GEDEG	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
7	REKLAME ILEGAL	1	12-04-2022	MOJOSARI DAN KEMLAGI	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI



8	REKLAME ILEGAL	1	15-11-2022	MOJOSARI	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
9	REKLAME ILEGAL	1	16-12-2022	SOOKO	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
10	REKLAME ILEGAL	1	20-12-2022	MOJOANYAR DAN SOOKO	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
11	REKLAME ILEGAL	1	28-12-2022	BANGSAL	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
12	REKLAME BANDO ILEGAL	1	23-12-2022	MOJOSARI	TIDAK MEMLIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI
13	REKLAME ILEGAL	1	18-03-2022	PURI	MENUNNGAK PAJAK REKLAME	MATERI REKLAME DI SEGEL	DISEGEL SAMPAI PELUNASAN PAJAK
14	MINOL	1	30-03-2022	PUNGGING DAN TRAWAS	PENJUALAN MINOL YANG TIDAK BERIJIN	BARANG BUKTI DI AMANKAN	DIARAHKAN UNTUK MENGURUS IJIN BERJUALAN MINOL
15	MINOL	1	27-12-2022	Jl. BY PAS	PENJUALAN MINOL YANG TIDAK BERIJIN	BARANG BUKTI DI AMANKAN	DIARAHKAN UNTUK MENGURUS IJIN BERJUALAN MINOL
16	SUARA BISING	1	11-08-2022	SOOKO	TRANTIBUM	TINJAU LOKASI	MENGARAHKAN PIHAK DESA UNTUK MELAKUKAN MEDIASI



17	SUARA BISING	1	15-08-2022	MOJOKEMBANG SORE PARK PACET	TRANTIBUM	KOORDINASI DENGAN DESA DAN TINJAU LOKASI	DIADAKAN RAPAT DENGAN PEMILIK, MENGHIMBAU DAN MEMBERI ARAHAN UNTUK SELALU MEMPERHATIKAN SUARA AGAR TIDAK MENGGANGGU TRANTIBUM
18	BANGUNAN LIAR	1	24-08-2022	NGORO	BANGUNAN LIAR	KOORDINASI DENGAN DESA DAN TINJAU LOKASI	DIADAKAN RAPAT DENGAN PEMILIK BANGLI
19	BANGUNAN TIDAK BERIZIN	1	5-12-2022	PERUM ABADI MEGAHJAYA MLIRIP JETIS	BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	PENYEGELAN	DI BERI HIMBAUAN UNTUK SEGERA MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
20	PKL	1	19-10-2022	MOJOSARI	MENEMPATI SEMPADAN JALAN	SOSIALISASI	MEMBERI ARAHAN UNTUK TIDAK BERJUALAN DI SEMPADAN JALAN
21	PMKS	1	27-12-2022	WARUNG KOPI RANDU DAWAR BLANDONG	TRANTIBUM	PENERTIBAN	DILAKSANAKAN PENERTIBAN DAN DIBAWA KE DINSOS UNTUK PROSES PENDATAAN



22	PMKS	1	10-05-2022	MOJOSARI	TRANTIBUM	PEMASANGAN PAPAN PENUTUPAN PAPAN PENGAWASAN	MELAKSANAKAN PATROLI DAN PENGAWASAN
23	PMKS	1	20-10-2022	MOJOSARI, TROWULAN, SOOKO	TRANTIBUM	KOORDINASI DENGAN DINSOS DAN MELAKUKAN PENERTIBAN DI BEBERAPA TEMPAT	DI BAWA KE DINSOS DAN DI LAKUKAN PENDATAAN
24	PMKS	1	27-12-2022	WARUNG AWANG AWANG	TRANTIBUM	PENERTIBAN	DILAKUKAN PENDATAAN DAN PEMBINAAN
25	INSPEKSI PELAJAR		5-12-2022	STADION MOJOSARI	INSPEKSI INDISIPLINER PELAJAR	SOSIALISASI	MEMBERI PENGARAHAN KEPADA PARA PELAJAR AGAR TIDAK BERKELIARAN DI JAM-JAM SEKOLAH
26	OPERASI BERSAMA PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN	120	2-01-2022-s/d 31-12-2022	WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO	PENEGAKAN ATURAN COVID-19	PENGAWASAN PPKM	TEGURAN, LISAN, TERTULIS, TIPIRNG



27	PENYIDIKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN CUKAI ROKOK ILEGAL	13	-21-07-2022 -22-07-2022 -25-07-2022 -18-08-2022 -19-08-2022 -21-08-2022 -22-08-2022 -23-08-2022 -25-08-2022 -19-09-2022 -20-09-2022 -22-09-2022 -21-12-2022	PEDAGANG ECERAN YANG BERADA DI WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO	ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI ROKOK ILEGAL	SOSIALISASI DAN PENCARIAN BARANG BUKTI	TEGURAN LISAN
28	SOSIALISASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN CUKAI ROKOK ILEGAL	4	-13-10-2022 -2-11-2022 -26-10-2022 -03-12-2022	MASYARAKAT, PEDAGANG DAN PEROKOK DI WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO	ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI ROKOK ILEGAL	SOSIALISASI	MEMBERI INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DAN PEROKOK
<b>JUMLAH</b>		<b>161</b>					



## **A.2 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan diimplementasikan dengan Pelaksanaan Kegiatan.**

Titik-titik rawan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto yang berpotensi terjadinya unjukrasa dan kerusuhan masa sehingga menyebabkan masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman. Adapun wilayah yang menjadi imbas dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah :

- (1) Wilayah Kecamatan Ngoro unjukrasa di sebabkan karena buruh yang menuntut kenaikan upah
- (2) Wilayah Kecamatan Jetis Unjukrasa disebabkan karena masyarakat tidak menghendaki adanya pengolahan limbah pabrik
- (3) Wilayah Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang karena masyarakat tidak menghendaki adanya penambangan galian golongan C
- (4) Wilayah Kecamatan Dawarblandong masyarakat terganggu dengan adanya kegiatan Pengukuhan anggota baru Perguruan silat yang kemungkinan akan terjadi tindakan anarkis dengan masyarakat sekitar

Data yang dihimpun selama Tahun 2022 untuk Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 diperoleh sebesar 100% membuktikan bahwa Jumlah gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun N sebesar 297 gangguan dan Jumlah penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan Tahun N sebesar 297 gangguan, melalui kegiatan operasi dan pengendalian, monitoring dan patroli terhadap masyarakat yang tidak menghendaki keberadaan penambangan galian golongan C, tuntutan buruh terkait kenaikan upah, pengolahan limbah pabrik dan indikasi adanya kerusuhan masa yang diakibatkan perguruan silat serta Operasi yustisi protokol kesehatan terkait penanganan Covid 19 yang dianggarkan pada 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.295.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.244.829.840,- dengan realisasi 96,13% silfa karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal Pejabat Daerah dalam rangka kunjungan kerja;
2. Sub kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui



penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.030.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 847.700.000,- dengan target realisasi 82,30% silfa karena pelaksanaan kegiatan berbenturan dengan pengamanan hari raya idul fitri dan nataru atas permintaan instansi vertikal;

3. Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pagu anggaran Rp. 216.000.000,- dengan realisasi Rp. 187.183.000,- dengan realisasi target 86,66% silfa karena rencana kegiatan berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan kirab pataka dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Timur.

$$\frac{\text{Persentase Gangguan Trantibum Tahun N} \times 100\%}{\text{Persentase Penanganan Gangguan Trantibum yang terselesaikan Tahun N}}$$

$$\frac{297}{297} \times 100\% = 100\%$$

Adapun peta Kabupaten Mojokerto yang terdapat titik-titik pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tergambar pada halaman 26.



Pelanggaran Perda dan Perkada	Gangguan Trantibunmas
● Perusahaan/toko modern tanpa ijin atau masa ijinnya tidak berlaku	● Unjuk rasa karena kenaikan upah buruh
● Reklame	● Unjuk rasa karena penambangan galian golongan C
● Pedagang Kaki Lima	● Unjuk rasa karena Pengolahan limbah Pabrik
● Warung remang-remang dan pekerja seks komersial	● Kerusakan masa yang diindikasikan akibat perguruan silat dengan masyarakat sekitar
● Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan manusia silver	● Operasi yustisi protokol kesehatan
● Pita cukai rokok ilegal/pita cukai palsu	



**Tabel 3.4**  
**DATA KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM**  
**TAHUN 2022**

NO	OBYEK PELANGGARAN PERDA	KUANTITAS	TANGGAL	LOKASI	JENIS GANGGUAN	PROSES PENYELESAIAN
1	Penyekatan Sosial Distancing jalur wisata dengan pemberlakuan kendaraan plat nomor ganjil genap dalam rangka PPKM Level 1	10	01/01/2022 - 02/01/2022, 08/01/2022 - 09/01/2022, 15/01/2022 - 16/01/2022, 22/01/2022 - 23/01/2022, 29/01/2022 - 30/01/2022,	Wilayah Hukum Polres Mojokerto	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Membatasi dan mengalihkan arus kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang ber plat nomor polisi genap untuk kembali dan tidak menuju tempat wisata



2	Penyekatan Sosial Distancing jalur wisata dengan pemberlakuan kendaraan plat nomor ganjil genap dalam rangka PPKM Level 1	10	01/02/2022, 05/02/2022- 06/02/2022, 12/02/2022- 13/02/2022, 19/02/2022- 20/02/2022, 26/02/2022- 28/02/2022,	Wilayah Hukum Polres Mojokerto	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Membatasi dan mengalihkan arus kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang ber plat nomor polisi genap untuk kembali dan tidak menuju tempat wisata
3	Penyekatan Sosial Distancing jalur wisata dengan pemberlakuan kendaraan plat nomor ganjil genap dalam rangka PPKM Level 1	9	03/03/2022, 05/03/2022- 06/03/2022, 12/03/2022- 13/03/2022, 19/03/2022- 20/03/2022, 26/03/2022- 27/03/2022,	Wilayah Hukum Polres Mojokerto	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Membatasi dan mengalihkan arus kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang ber plat nomor polisi genap untuk kembali dan tidak menuju tempat wisata

4	Operasi Yustisi	138	01/01/2022-31/12/2022	Wilayah Hukum Polres Mojokerto	Deteksi dini Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Preventif
5	PENGAMANAN OPERASI KETUPAT SEMERU 2022	14	25/04/2022-08/05/2022	Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kab/Kota	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Mengantisipasi melonjaknya jumlah pemudik
6	Pengamanan Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Kabupaten Mojokerto 1443 H / 2022	4	23/06/2022, 27/06/2022, 28/06/2022, 01/07/2022	Halaman Pemda Kab. Mojokerto	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Pengamanan Pemberangkatan calon jamaah haji kabupaten mojokerto
7	Pengamanan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Mojokerto 1443 H / 2022	5	29/07/2022, 05/08/2022, 08/08/2022, 09/08/2022, 13/08/2022	Halaman Pemda Kab. Mojokerto	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Pengamanan Pemulangan jamaah haji kabupaten mojokerto



8	PENGAMANAN PERAYAAN NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023 DI WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO	9	23/12/2022 - 31/12/2022	Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kab/Kota	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Preventif
9	UNJUK RASA	1	29/11/2022	Halaman Pemda Kab. Mojokerto	Pencegahan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Mediasi perwakilan dari pengunjuk rasa

10	UNJUK RASA	1	22/12/2022	Halaman Pemda Kab. Mojokerto	Pencegahan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Mediasi perwakilan dari pengunjung rasa
11	Pencegahan Dini	1	6 Januari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



				2. Simpang 4 Awang-Awang Kec. Mojosari		Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untukantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
				3. Wilayah Kec. Ngoro		
12	Pencegahan Dini	1	10 Januari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



				2. Indomaret dan Alfamart Jl. Airlangga Mojosari		Teguran lisan terhadap 10 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
				3. Gunung Bale Resort Kec. Trawas		Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
				4. Indomaret Ketapanrame Kec. Trawas		



				5. Waroeng Desa Kec. Trawas		
				6. Cafe Dsn Botok Palung Kec. Trowulan		
13	Pencegahan Dini	1	11 Januari 2022	1. Alfamart Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



				2. Hotel Bukit Surya Padusan Kec. Pacet		Teguran lisan terhadap 2 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
				3. Hotel Carina & Villa Ratu Padusan Kec. Pacet		Menghimbau untuk menyiapkan barcode aplikasi peduli lindungi di pintu masuk guna membatasi jumlah pengunjung agar terhindar dari kerumunan
14	Pencegahan Dini	1	12 Januari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



				2. Warkop Cethe Kec. Pungging		Teguran lisan terhadap 13 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
				3. Hotel Wonokerto Kec. Pungging		Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
				4. Indomaret Ds. Lolawang Kec. Ngoro		



				5. Pertigaan NIP Ngoro Kec. Ngoro		
15	Pencegahan Dini	1	15 Januari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan
				2. Hotel Puri Indah Kec. Puri		Teguran lisan terhadap 2 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto



						Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untukantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
						Menghimbau untuk menyiapkan barcode aplikasi peduli lindungi di pintu masuk guna membatasi jumlah pengunjung agar terhindar dari kerumunan
16	Pencegahan Dini	1	16 Januari 2022	1. Jembatan Kali Krtomong Pacet Kec. Pacet	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



				2. Tikungan Gajah Mungkur Kec. Pacet		Teguran lisan terhadap 14 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
				3. Wisata Tegal Klopo Kec. Pacet		
17	Pencegahan	1	18 Januari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



	Dini			2. Warkop Lela Kec.Pungging		Teguran lisan terhadap 5 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
						Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
18	Pencegahan Dini	1	24 Januari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



				2. Wilayah Kec. Bangsal		Teguran lisan terhadap 3 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
						Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
19	Pencegahan Dini	1	25 Januari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



						Teguran lisan terhadap 6 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
						Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
20	Pencegahan Dini	1	26 Januari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



						Teguran lisan terhadap 6 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
						Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
21	Pencegahan Dini	1	28 Januari 2022	1. Kawasan Pertanian Dusun Domas Kec Trowulan	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



				2. Simpang 4 Sooko Kec. Sooko		Teguran lisan terhadap 8 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
						Menertibkan pengemis agar tidak berada di Simpang 4 Sooko
22	Pencegahan Dini	1	31 Januari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan kepada warga masyarakat/Pelaku Usaha untuk selalu mematuhi protokol kesehatan



				2. Warkop Lela Kec. Pungging		Teguran lisan terhadap 2 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
						Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
23	Pencegahan Dini	1	2 Februari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	pembongkaran bangunan warung remang sejumlah 1 warung



				2. Wilayah Kec. Trawas		Teguran lisan terhadap 2 orang pelanggar oleh Anggota Satpol PP Kab. Mojokerto
24	Pencegahan Dini	1	3 Februari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
				2. Simpang 4 R.A Basuni Kec. Sooko		Penjangkauan penyandang masalah kesejahteraan sosial



				3. Wilayah Kec. Gedeg		
25	Pencegahan Dini	1	7 Februari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Memantau aktifitas pengunjung di sekitar warung remang untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban
				2. Simpang 4 R.A Basuni Kec. Sooko		Penjangkauan penyandang masalah kesejahteraan sosial



				3. Wilayah Kec. Bangsal		Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kegiatan cuci mobil yang mengganggu kenyamanan lingkungan
26	Pencegahan Dini	1	8 Februari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan warung remang disertai membantu pembongkaran warung
				2. Simpang 4 R.A Basuni Kec. Sooko		Penjangkauan penyandang masalah kesejahteraan sosial



						Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kegiatan cuci mobil yang mengganggu kenyamanan lingkungan
27	Pencegahan Dini	1	16 Februari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Monitor warung remang Janti disertai dengan membantu pembongkaran warung
28	Pencegahan Dini	1	21 Februari 2022	1. Pujasera Bumi Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas	Ketertiban Umum	Himbauan pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait kunjungan Bupati di Wilayah Trawas



				2. Desa Padusan Kec. Pacet		Himbauan pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait kunjungan Gubernur dalam pemberian Surat Keputusan Sosial pengelolaan lahan pada masyarakat Padusan Pacet
29	Pencegahan Dini	1	24 Februari 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Monitor warung remang Janti antisipasi dipakai untuk prostitusi online
				2. Wilayah Kec. Jetis		



30	Pencegahan Dini	1	8 Maret 2022	1. Wilayah Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan terkait aktivitas di sekitar warung guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum
				2. Wilayah Kec. Gondang		
				3. Wilayah Kec. Dlanggu		



31	Pencegahan Dini	1	9 Maret 2022	1. Simpang 4 RA Basuni	Ketertiban Umum	Himbauan gepeng (gelandang dan pengemis di sekitar Simpang 4 RA Basuni
				2. Warung Remang Janti Kec. Mojosari		Monitor warung remang Janti
32	Pencegahan Dini	1	10 Maret 2022	1. Wilayah Kec. Trowulan	Ketertiban Umum	Himbauan kegiatan Ujian Perangkat Desa di Wilayah Trowulan



33	Pencegahan Dini	1	21 Maret 2022	1. Wilayah Kec. Jetis	Ketertiban Umum	Himbauan terkait aktivitas di sekitar warung guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum
				2. Wilayah Kec. Mojosari		
34	Pencegahan Dini	1	22 Maret 2022	1. Warung Remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan terkait aktivitas di sekitar warung guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum



				2. Pasedan Agung Kec. Trawas		Himbauan terkait Protokol Kesehatan Covid-19 pada acara hari air sedunia di Paseban Agung
35	Pencegahan Dini	1	28 Maret 2022	1. Simpang 4 R.A. Basuni, Kec. Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan terkait aktivitas di sekitar warung guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum
				2. Warung Remang Janti, Awang awang		Penjangkauan penyandang masalah kesejahteraan sosial



36	Pencegahan Dini	1	30 Maret 2022	1. Kantor Grab Jl. Rajasa Negara, Banjaragung Kec. Puri	Ketertiban Umum	Pembagian Sembako kepada Para Driver Grab
				2. Ruwat Deso Desa Gayam Kec. Bangsal		Pembagian Masker Kepada Warga Yang tidak Menggunakan Masker dan Menghimbau agar tetap jaga jarak
37	Pencegahan Dini	1	31 Maret 2022	1. Wilayah Kec. Jetis	Ketertiban Umum	Himbauan terkait aktivitas di sekitar warung guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum



38	Pencegahan Dini	1	4 April 2022	1. Wilayah Kec Pacet	Ketertiban Umum	Himbauan tempat perjudian sabung ayam dan dadu di Dsn. Summersino, Ds. Sumberkembar Kec. Pacet
				2. Warung remang janti Kec. Mojosari		Himbauan pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Janti
39	Pencegahan Dini	1	5 April 2022	1. Simpang 4 R.A Basuni Kec. Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Kec. Sooko



				2. Wilayah Kec. Jatirejo		Peninjauan lokasi aset Kejaksaan tinggi Jawa timur
40	Pencegahan Dini	1	15 April 2022	1. Ponpes Segoro Agung Ds. Sentonorejo Kec. Trowulan	Ketertiban Umum	Himbauan terkait Protokol Kesehatan Covid-19 pada acara Milad ke VII Ponpes Segoro Agung Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan
41	Pencegahan Dini	1	21 April 2022	1. Wilayah Kec. Pacet	Ketertiban Umum	Himbauan pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Centong Kec. Gondang



				2. Warung Remang Centong Kec. Gondang		Himbauan terkait Protokol Kesehatan Covid-19 di Wilayah Kec. Pacet
42	Pencegahan Dini	1	22 April 2022	1. Warung remang-remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di warung remang-remang Janti Kec. Mojosari dan warung remang-remang Randu Ds. Jolotundo Kec. Jetis
				2. Warung remang-remang Randu Ds. Jolotundo Kec. Jetis		



43	Pencegahan Dini	1	23 Mei 2022	1. Warung remang Awang-Awang Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
				2. Warung remang Ngrame Kec. Pungging		sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Ngrame Kec. Pungging yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat



44	Pencegahan Dini	1	24 Mei 2022	1. Warung remang Awang-Awang Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
				2. Warung remang Ngrame Kec. Pungging		sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Ngrame Kec. Pungging yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
45	Pencegahan Dini	1	25 Mei 2022	1. Warung remang Awang-Awang Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat



				2. Warung remang Ngrame Kec. Pungging		sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Ngrame Kec. Pungging yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
46	Pencegahan Dini	1	30 Mei 2022	1. Warung remang-remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Memantau pembongkaran oleh salah satu pemilik warung remang-remang janti Kec. Mojosari yang melanggar perda
				2. Wisata alam Dlundung Kec. Trawas		Himbauan kepada pengunjung wisata alam Dlundung Kec. Trawas untuk mematuhi protokol kesehatan

47	Pencegahan Dini	1	2 Juni 2022	1. Warung remang-remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Menindaklanjuti laporan warga untuk Himbuan dan sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
				2. Pemandian air panas Padusan Kec. Pacet		Himbauan kepada pengunjung pemandian air panas padusan Kec. Pacet untuk mematuhi protokol kesehatan



48	Pencegahan Dini	1	3 Juni 2022	1. Warung remang-remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Menindaklanjuti laporan warga untuk Himbauan dan sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
				2. Warung Remang Ngrame Kec. Pungging		Menindaklanjuti laporan warga untuk Himbauan dan sosialisasi Ngrame Kec. Pungging yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat



				3. Amora Coffe Ds. Seruni Kec. Pungging		himbauan kepada pemilik Amora Coffe untuk tidak menjual miras
49	Pencegahan Dini	1	6 Juni 2022	1. Warung remang-remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Menindaklanjuti laporan warga untuk Himbauan dan sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat



				2. Pemandian air panas Padusan Kec. Pacet		Himbauan kepada pengunjung pemandian air panas padusan Kec. Pacet untuk mematuhi protokol kesehatan
50	Pencegahan Dini	1	7 Juni 2022	1. Warung remang-remang Janti Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di warung remang-remang di Wilayah Kec Jetis yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
51	Pencegahan Dini	1	10 Juni 2022	a) Dsn Kangkungan Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar	Ketertiban Umum	himbauan agar tidak melakukan pembangunan yang berada di tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang berada di Dsn Kangkungan Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar

				b) Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari		sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di warung remang awang-awang Kec. Mojosari dan warung remang Ngrame Kec. Pungging yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
				c) Warung Remang Ngrame Kec. Pungging		

52	Pencegahan Dini	1	21 Juni 2022	a) Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	himbauan pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di warung remang awang-awang Kec. Mojosari yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
				b) Candi Jolotundo Kec. Trawas		Himbauan kepada pengunjung Candi Jolotundo Kec. Trawas untuk mematuhi protokol kesehatan
53	Pencegahan Dini	1	29 Juni 2022	a) Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di warung remang awang-awang Kec. Mojosari yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat



				b) Wilayah Kec. Sooko		Himbauan pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait gelandangan, pengemis dan anak jalanan di wilayah Kec. Sooko
54	Pencegahan Dini	1	4 Juli 2022	a) Gayaman Kec. Mojoanyar	Ketertiban Umum	sosialisasi kepada penjual hewan ternak untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha
				b) Banjaragung Kec. Puri		



				c) Jl. Wijaya Kusuma Kec. Sooko		
				d) Jl. RA Basuni Kec. Sooko		
55	Pencegahan Dini	1	5 Juli 2022	a) Ds. Kemantren Kec. Gedeg	Ketertiban Umum	sosialisasi kepada penjualan hewan ternak untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha



				b) Ds. Kembangbelor Kec. Pacet		
				c) Ds. Mlirip Kec. Jetis		
				d) Ds. Mojokumpul Kec. Kemlagi		



				e) Ds. Pelabuhan Kec. Jetis		
				f) Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo		
				g) Ds. Sumberkembang Kec. Pacet		



56	Pencegahan Dini	1	6 Juli 2022	a) Ds. Mojorejo Kec. Pungging	Ketertiban Umum	sosialisasi kepada penjual hewan ternak untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha
				b) Ds. Lebaksono Kec. Pungging		
				c) Dsn. Sawah wetan Ds. Sidomulyo Kec. Bangsal		



				d) Dsn. Pencarikan Ds. Jetis Kec. Jetis		
				e) Dsn. Pencarikan Ds. Pelabuhan Kec. Jetis		
				f) Dsn. Pelabuhan Ds. Jetis Kec. Jetis		



				g) Dsn. Kecambon Ds. Gondang Kec. Gondang		
				h) Ds. Tampungrejo Kec. Puri		
				i) Ds. Plosari Kec. Puri		



				j) Dsn. Trece Ds. Sajen Kec. Pacet		
57	Pencegahan Dini	1	7 Juli 2022	a) Ds. Jotangan Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	sosialisasi kepada penjual hewan ternak untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha
				b) Dsn. Belahan Ds. Randubangu Kec. Mojosari		



				c) Dsn. Krebungdempul Ds. Randubangu Kec. Mojosari		
				d) Ds. Bicak Kec. Trowulan		
				e) Ds. Klinterejo Kec. Sooko		



				f) Ds. Sambiroto Kec. Sooko		
58	Pencegahan Dini	1	16 Juli 2022	a) Dusun Selogendogo Desa Sumberwuluh	Ketertiban Umum	himbauan terkait protokol kesehatan kegiatan Sholawat Habib Al- Haddad
				Kecamatan Dawarblandong		



59	Pencegahan Dini	1	23 Juli 2022	1. Warung remang Awang-Awang Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Awang-Awang Kec. Mojosari yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
				2. Warung remang Ngrame Kec. Pungging		sosialisasi pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas di Warung Remang Ngrame Kec. Pungging yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
60	Pencegahan Dini	1	7 Agustus 2022	a) Pasar Trowulan, Jl. Raya Trowulan Kab. Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 pada kegiatan event bantangan ruwat pasar 2022 di Pasar Trowulan Kab. Mojokerto



61	Pencegahan Dini	1	9 Agustus 2022	a) Balai Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Penilaian Prestasi dan Klarifikasi Lapangan Pelaksanaan Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
62	Pencegahan Dini	1	10 Agustus 2022	a) Pertigaan Seruni, pos warung desa	Ketertiban Umum	Menghalau terjadinya gangguan Kamtibmas antara warga dan warga baru Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Mojokerto Tahun 2022
				Jl. Raya Trawas dan Pos Polsek Trawas		



63	Pencegahan Dini	1	13 Agustus 2022	a) Gedung R.P Soeroso (DEKOPINDA) Jl. Raya Jabon. Mojoanyar	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Hari Koperasi yang ke 75 Tahun 2022
64	Pencegahan Dini	1	14 Agustus 2022	a) Lapangan Ds. Karangjeruk, Kec. Jatirejo	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Festival Tani dan UMKM di Ds. Karangjeruk Kec. Jatirejo

				b) Halaman Ponpes Darut Taqwa Ngembah, Kec. Dlanggu		Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Bhakti Sosial Komunitas Trail di Ds. Ngembah Kec. Dlanggu
65	Pencegahan Dini	1	17 Agustus 2022	a) Rumas Dinas Wakil Bupati Kec. Puri	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan GPAnsor Kabupaten Mojokerto Bersholawat bersama Habib Ahmad Al Hadar, S.E.I dan Dr. H. Muhammad Albarraa, Lc.,M.Hum dalam rangka Tasyakuran HUT RI ke 77 di Rumah Dinas Wakil Bupati Jl. Jayanegara 201 A Desa Kenanten Kec. Puri

				b) Dusun Karang Wungu Desa Kenanten Kecamatan Puri		Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Event Tournament Bola Voly di Dusun Karang Wungu Desa Kenanten Kec. Puri
66	Pencegahan Dini	1	23 Agustus 2022	a) Lapangan Trawas (Depan Koramil Trawas)	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Majafest 2022Tasyakuran HUT RI ke 77 di Rumah Dinas Wakil Bupati Jl. Jayanegara 201 A Desa Kenanten Kec. Puri

67	Pencegahan Dini	1	24 Agustus 2022	a) Lapangan Trawas (Depan Koramil Trawas)	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Majafest 2022
68	Pencegahan Dini	1	25 Agustus 2022	a) Dsn. Randugembung Ds. Randugenengan Kec. Dlanggu	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan patroli pemantauan acara visit LDC Jagung Mojokerto
				b) Lapangan Trawas (Depan Koramil Trawas) dan area halaman Paseban Agung Kec. Pacet		Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Majafest 2022



69	Pencegahan Dini	1	26 Agustus 2022	a) Lapangan Trawas (Depan Koramil Trawas) dan area halaman Paseban Agung Kec. Pacet	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Majafest 2022
70	Pencegahan Dini	1	27 Agustus 2022	a) Lapangan Trawas (Depan Koramil Trawas) dan area halaman Paseban Agung Kec. Pacet	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada kegiatan Majafest 2022
71	Pencegahan Dini	1	23 September 2022	Kampus IKHAC pp Amanatul Ummah Kec. Pacet Kab. Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan Kegiatan Musyawarah Nasional Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja di kampus IKHAC PP Amanatul Ummah Kec. Pacet Kab. Mojokerto

72	Pencegahan Dini	1	29 September 2022	Lapangan Yonif Para Raider 503/Mayangkara	Ketertiban Umum	Himbauan kepada penonton Konser Musik “ Sembuh Dari Luka “ mematuhi prokes
73	Pencegahan Dini	1	5 Oktober 2022	Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto		Mengikuti rangkaian Upacara Serah Terima Pataka Kirab Jer Basuki Mawa Beya Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-77 Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
74	Pencegahan Dini	1	6 Oktober 2022	Halaman Rumah Dinas Bupati Gresik		Penyerahan Lambang Jer Basuki Mawa Beya dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto menuju Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-77 Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

						Dan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Lambang Jer Basuki Mawa Beya akan di Kirab ke Pemerintah Kabupaten selanjutnya
75	Pencegahan Dini	1	8 Oktober 2022	Dsn. Tumpul Jati Ds. Jatijejer Kec. Trawas Kab. Mojokerto	Ketertiban Umum	Monitoring Kegiatan Jambore Nasional IKAGI XII dan Himbauan kepada peserta agar tetap mematuhi Protokol Kesehatan
76	Pencegahan Dini	1	10 Oktober 2022	1. Wilayah Kecamatan Gondang	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Gondang dan Wilayah Kecamatan Pacet

				2. Wilayah Kecamatan Pacet		
77	Pencegahan Dini	1	24 Oktober 2022	Simpang 4 Sooko Jl. RA. Basuni Kec. Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan kepada ANJAL dan GEPENG (PMKS) yang berada di Simpang 4 Jl. RA Basuni Sooko supaya tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai Perda nomor 2 Tahun 2013



						Himbauan kepada pengguna jalan untuk tidak memberikan uang kepada Pengemis, Pengamen, Anak Jalanan, dan PMKS lainnya
78	Pencegahan Dini	1	27 Oktober 2022	1. Wilayah Kecamatan Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan kepada ANJAL dan GEPENG (PMKS) yang berada di Simpang 4 Jl. RA Basuni Sooko supaya tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai Perda nomor 2 Tahun 2013

				2. Wilayah Kecamatan Gedeg		Himbauan kepada pengguna jalan untuk tidak memberikan uang kepada Pengemis, Pengamen, Anak Jalanan, dan PMKS lainnya
				3. Wilayah Kecamatan Kemlagi		
79	Pencegahan Dini	1	29 Oktober 2022	1. Lapangan Sooko Kec. Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan Covid-19 Acara Komsos Kreatif Gowes dalam rangka HUT TNI ke-77

				2. Pasar Kedungmaling Kec. Sooko		
				3. Jl. Kemakmuran Kec. Sooko		
				4. Jl. Raya Brangkal Kec. Sooko		



80	Pencegahan Dini	1	29 Oktober 2022	1. Lapangan Sooko Kec. Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Penerapan protokol kesehatan Covid-19
						pada kegiatan Konser Musik Amal dalam rangka HUT TNI ke-77 di Lapangan Sooko
81	Pencegahan Dini	1	1 November 2022	1. Wilayah Kecamatan Gondang	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Wilayah Kecamatan Gondang dan Wilayah Kecamatan Pacet



				2. Wilayah Kecamatan Pacet		
82	Pencegahan Dini	1	8 November 2022	1. Wilayah Kecamatan Pungging	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Penerapan protokol kesehatan Covid-19 Di Wilayah Gedeg dan Kemlagi
				2. Wilayah Kecamatan Trawas		



83	Pencegahan Dini	1	19 November 2022	- Pendopo Graha Maja Tama Kabupaten Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan protokol kesehatan covid-19 acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) I Kabupaten Mojokerto Tahun 2022
				- Aula SMAN I Sooko		



				- Aula SMKN I Sooko		
				- Aula Kantor Kemenag Kab. Mojokerto		
84	Pencegahan Dini	1	20 November 2022	- Pendopo Graha Maja Tama Kabupaten Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan protokol kesehatan covid-19 acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) I Kabupaten Mojokerto Tahun 2022



85	Pencegahan Dini	1	21 November 2022	- Wilayah Kecamatan Pungging	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kec. Pungging yang terindikasi digunakan untuk prostitusi
				- Wilayah Kecamatan Trawas		Menghimbau pengunjung wisata agar selalu menggunakan masker serta mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
86	Pencegahan Dini	1	22 November 2022	- Wilayah Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum terkait penertiban pemasangan reklame yang tidak memiliki izin

				- Wilayah Kec. Pungging		Himbauan kepada GEPENG (PMKS) yang berada di Wilayah Kec. Pungging serta menghimbau agar tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai Perda nomor 2 Tahun 2013
				- Wilayah Kec. Ngoro		

87	Pencegahan Dini	1	23 November 2022	- Lapangan Badung, Desa Kedung Lengkong, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan protokol kesehatan covid-19 acara pengawasan penggunaan sarana pertanian
88	Pencegahan Dini	1	24 November 2022	- Lapangan Badung, Desa Kedung Lengkong, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan protokol kesehatan covid-19 acara pengawasan penggunaan sarana pertanian
89	Pencegahan Dini	1	27 November 2022	- Halaman Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan protokol kesehatan covid-19 acara gowes hut ke-51 korpri tahun 2022

90	Pencegahan Dini	1	28 November 2022	- Wilayah Kecamatan Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum terkait penertiban pemasangan reklame yang tidak memiliki izin
				- Wilayah Kecamatan Sooko		Himbauan kepada pengemis yang berada di Wilayah Kec. Sooko serta menghimbau agar tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai Perda nomor 2 Tahun 2013
91	Pencegahan Dini	1	29 November 2022	- Halaman Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait penerapan protokol kesehatan covid-19 Acara Peringatan HUT Korpri Ke-51 dan Hari Kesehatan Nasional ke-58 Tahun 2022

92	Pencegahan Dini	1	30 November 2022	- Wilayah Kecamatan Pungging	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan protokol kesehatan covid-19
				- Wilayah Kecamatan Pacet		Pembagian masker kepada masyarakat yang tidak memakai masker
93	Pencegahan Dini	1	1 Desember 2022	- Wilayah Kecamatan Bangsal	Tidak memiliki ijin	Ditertibkan dan disimpan sebagai barang bukti

				- Wilayah Kecamatan Mojosari	Pemasangan	
94	Pencegahan Dini	1	2 Desember 2022	- Wilayah Kecamatan Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan kepada pengamen yang berada di Wilayah Kec. Sooko serta menghimbau agar tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai Perda nomor 2 Tahun 2013
				- Wilayah Kecamatan Trowulan	tidak memiliki ijin pemasangan	Ditertibkan dan disimpan sebagai barang bukti

95	Pencegahan Dini	1	6 Desember 2022	- Wilayah Kec. Mojosari	tidak memiliki ijin pemasangan	Ditertibkan dan disimpan sebagai barang bukti
				- Wilayah Kec. Pacet	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
						Himbauan terkait protokol kesehatan covid-19 menghimbau pengunjung wisata agar selalu mematuhi protokol kesehatan



96	Pencegahan Dini	1	7 Desember 2022	- Gedung Graha Nuswantara Kampus Unim Kec. Mojoanyar	Ketertiban Umum	Himbauan terkait protokol kesehatan covid-19 pada acara Prosesi Wisuda SI Ke-19 Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Islam Mojopahit (UNIM) Kec. Mojoanyar
				- Wilayah Kec. Mojoanyar	tidak memiliki ijin pemasangan	Ditertibkan dan disimpan sebagai barang bukti
97	Pencegahan Dini	1	8 Desember 2022	- Wilayah Kec. Puri	Ketertiban Umum	Himbauan kepada pengemis yang berada di Wilayah Kec. Sooko serta menghimbau agar tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai Perda nomor 2 Tahun 2013

				- Wilayah Kec. Sooko	tidak memiliki ijin pemasangan	Ditertibkan dan disimpan sebagai barang bukti
98	Pencegahan Dini	1	9 Desember 2022	- Wilayah Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan pelanggaran Trantibummas terkait aktivitas yang terindikasi dipakai tempat untuk prostitusi/pekat
				- Wilayah Kec. Trawas		Menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan covid-19



100	Pencegahan Dini	1	10 Desember 2022	- Wilayah Kec. Mojosari	tidak memiliki ijin pemasangan	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum terkait penertiban pemasangan reklame yang tidak memiliki izin
				- Wilayah Kec. Pacet	Ketertiban Umum	Himbauan kepada pengemis yang berada di Wilayah Kec. Mojosari serta menghimbau agar tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai Perda nomor 2 Tahun 2013
				- Wilayah Kec. Trawas		Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan protokol kesehatan covid-19

101	Pencegahan Dini	1	12 Desember 2022	- Wilayah Kec. Puri	tidak memiliki ijin pemasangan	Ditertibkan dan disimpan sebagai barang bukti
				- Wilayah Kec. Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan kepada pengamen yang berada di Wilayah Kec. Mojosari serta menghimbau agar tidak mengadakan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sesuai Perda nomor 2 Tahun 2013
102	Pencegahan Dini	1	16 Desember 2022	- Pendopo Pemda Kab. Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta protokol kesehatan covid-19

103	Pencegahan Dini	1	17 Desember 2022	- Gedung Perguruan Ilmu Silat Bamban Wonoploso Dsn. Ds.	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta protokol kesehatan covid-19
				Kec. Gondang Kab. Mojokerto		
104	Pencegahan Dini	1	18 Desember 2022	- Masjid Agung Darussalam MADASA Gemekan Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta protokol kesehatan covid-19



105	Pencegahan Dini	1	18 Desember 2022	- Masjid Agung Darussalam MADASA Gemekan Sooko	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta protokol kesehatan covid-19
106	Pencegahan Dini	1	27 Desember 2022	- Gedung TKNP I Mojosari, Ds. Menanggal Kec. Mojosari	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan protokol kesehatan covid-19
107	Pencegahan Dini	1	27 Desember 2022	- Pendopo Pemda Kab. Mojokerto	Ketertiban Umum	Himbauan terkait pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan protokol kesehatan covid-19

### **A.3 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja persentase keikutsertaan anggota Satpol PP/Satlinmas dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Desa pada Kecamatan yang paling banyak mengikutsertakan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang professional, tangguh dan berwibawa. Adapun desa yang mengikutsertakan anggota Linmas tahun 2022 paling banyak dalam pembinaan dan pelatihan adalah :

1. Wilayah Desa pada Kecamatan Ngoro jumlah Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sebanyak 52 orang
  2. Wilayah Desa pada Kecamatan Pungging jumlah Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sebanyak 52 orang
  3. Wilayah Desa pada Kecamatan Mojosari jumlah Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sebanyak 54 orang
  4. Wilayah Desa pada Kecamatan Kutorejo jumlah Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sebanyak 52 orang
  5. Wilayah Desa pada Kecamatan Dlanggu jumlah Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sebanyak 54 orang
  6. Wilayah Desa pada Kecamatan Gedeg jumlah Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sebanyak 54 orang
  7. Wilayah Desa pada Kecamatan Kemlagi jumlah Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sebanyak 52 orang
  8. Wilayah Desa pada Kecamatan Jetis jumlah Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sebanyak 54 orang
  9. Wilayah Desa pada Kecamatan Dawar Blandong jumlah Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan sebanyak
- Sedangkan untuk kegiatan pemilihan kepala desa jumlah anggota Satpol PP yang diikutsertakan sebanyak 209 orang dan anggota Satlinmas sebanyak 203 orang

Data yang dihimpun selama Tahun 2022 untuk Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 diperoleh sebesar 71,85% membuktikan bahwa Jumlah Satpol PP/Satlinmas ikutserta dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun N sebesar 7134 dan Jumlah Satpol PP/Satlinmas pada Tahun N sebesar 9929, dengan keikutsertaan Pol PP dan Linmas dalam Sinergitas Penyelenggaraan Tibuntranmas, Patroli, Pembinaan terkait Penegakan Hukum, Pemilihan Kepala desa, Pembinaan Pamswakarsa, Pelatihan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Outbond dan Pembinaan Satlinmas dibidang Cukai yang teralokasikan pada 9 Sub Kegiatan akan tetapi alokasi anggaran yang diampuh oleh Bidang Perlindungan Masyarakat ada 3 Sub Kegiatan yaitu :



1. Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupate/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.350.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.573.764.000,- dengan realisasi 76,83% silfa karena pelaksanaan kegiatan tidak semua tahapan pelaksanaan Pilkades dalam penyelenggaraan tibuntranmas melibatkan Satpol PP dan Satlinmas;
2. Sub kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- realiasasi sebesar Rp. 170.645.500,- dengan target realisasi 85,32% silfa karena pelaksanaan kegiatan dipergunakan untuk operasi yustisi juga pembinaan terhadap Satlinmas yang peruntukannya eks pembantu Bupati Mojosari (Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo dan Kecamatan Dlanggu);
3. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP/Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak asasi manusia dengan pagu anggaran Rp. 175.000.000,- dengan realisasi Rp. 142.592.000,- dengan realisasi 81,48% silfa karena pelaksanaan kegiatan untuk pembinaan dan pelatihan Satlinmas melibatkan 4 (empat) Kecamatan (Gedeg, Kemlagi, Jetis dan Dawar Blandong).

Jumlah Satpol PP/Satlinmas yang ikutserta dalam penyelenggaraan tibuntranmas Tahun N x 100%  
Jumlah Satpol PP/Satlinmas pada Tahun N

$$\frac{7134}{9929} \times 100\% = 71,85\%$$

**Tabel 3.5**  
**Rekapitulasi Keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketrentaman dan perlindungan masyarakat**

NO	SUB KEGIATAN	JUMLAH KETERLIBATAN SATPOL PP	JUMLAH KETERLIBATAN LINMAS	JUMLAH KESELURUHAN ANGGOTA SATPOLPP	JUMLAH KESELURUHAN ANGGOTA LINMAS
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			120	9875
	-	<i>Pam rangkaian tahapan Pilkades Tahun 2022</i>	209	203	JUMLAH KESELURUHAN ANGGOTA SATPOLPP DAN LINMAS
	-	<i>Kajian Lapangan &amp; Outbound</i>	43		9995
	-	<i>Giat Kesamaptaan di GOR Gajahmada</i>	80		
	-	<i>Gladi Bersih HUT Satpol PP dan Satlinmas</i>	80	20	Persentase Keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketrentaman dan perlindungan masyarakat
	-	<i>Apel HUT Satpol PP dan Satlinmas</i>	30	20	
		<i>Giat Kesamaptaan di Hotel Arayana</i>	120		
	-	<i>Giat Kesamaptaan di Halaman Pemkab Mojokerto</i>	60		



2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah Keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketrentaman dan perlindungan masyarakat	
	-	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana</i>	812	45	Jumlah seluruh anggota Satpol PP dan Satlinmas
	-	<i>Sosialisasi SIM Linmas &amp; Identifikasi Linmas dalam Penanggulangan bencana</i>			
3	Sosialisai perundang-undangan di bidang cukai bagi satlinmas	50	700	5352	x 100
4	Operasi Yustisi dalam rangka penanganan Covid-19	2880		9929	
Jumlah	6146	988			
Jumlah Keseluruhan	<b>7134</b>	71,85	%		



### A.4 Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efesien Dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai

Program yang diampuh sebanyak 2 program dengan 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan, pada tahun 2022 capaian indikator program yang tercapai 7 kegiatan dari 8 kegiatan yang teralokasikan dengan capaian 87% , dikarenakan

1. Rencana program yang sudah tersusun pelaksanaannya berbenturan dengan program kerja selain dari Perangkat Daerah
2. Belum adanya kesamaan satuan pengukuran indikator

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang tercapai Thn N} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh Indikator Program Thn N}} = 50\%$$

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai**

**TABEL CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**

REKAPITULASI RENCANA DAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							
Tahun	Berkas	KDD	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Target, Ukuran / Sasaran (Kuantitas, Kualitas/Waktu, dan Lainnya) (Sifatnya)	Tercapai dan Tidak Tercapai		
					Tercapai	Tidak Tercapai	Persentase
2022	18	19	18	18	18	18	100,00%
<b>Jumlah Indikator Program yang Tercapai</b> x 100% <b>Jumlah seluruh Indikator Program</b>					18	18	100%
<b>Jumlah Indikator Program yang Tercapai</b> x 100% <b>Jumlah seluruh Indikator Program</b>					18	18	100%

Tahun	Berkas	KDD	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Target, Ukuran / Sasaran (Kuantitas, Kualitas/Waktu, dan Lainnya) (Sifatnya)	Tercapai dan Tidak Tercapai		
					Tercapai	Tidak Tercapai	Persentase
2022	18	19	18	18	18	18	100,00%
<b>Jumlah Indikator Program yang Tercapai</b> x 100% <b>Jumlah seluruh Indikator Program</b>					18	18	100%

### A.5 Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efesien Dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja persentase realisasi anggaran perangkat daerah

Realisasi anggaran pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 87% sampai bulan Desember 2022 dibuktikan dengan Laporan Realisasi Anggaran sebesar 80,72% dikarenakan :

1. Rencana kegiatan yang sudah direncanakan berbenturan dengan kegiatan diluar rencana
2. Alokasi anggaran untuk pihak terkait penyerapannya belum sampai batas maksimal atau sesuai dengan anggaran yang tersedia
3. Alokasi anggaran DBHCHT pelaksanaannya pada Semester II dikarenakan menunggu PMK terbaru dan hasil koordinasi dengan Bea Cukai Pabean B Sidoarjo.
4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terlampir

DATA REALISASI BELANJA DAN KENDALA PER SUB KEGIATAN 3-D BULAN DESEMBER TA 2022

NO	OPD/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RENCANA 3-D DESEMBER (Rp)	%	REALISASI 3-D DESEMBER (Rp)	%	REKAP (Rp)	% KINERJA REALISASI 3-D DESEMBER	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>SATPOL PP</b>	<b>17.992.326.619</b>	<b>17.992.326.619</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.487.219.214</b>	<b>80,72%</b>	<b>3.655.118.281</b>	<b>80,72%</b>	
1	Penyediaan dan pemeliharaan Perangotan Daerah	7.500.000	7.500.000	100,00%	7.500.000,00	100,00%	410.000	99,00%	Sisa dan Belanja Penggantian
2	Contoh: Biaya Penggantian (Jenis)	7.500.000	7.500.000	100,00%	6.712.080,00	89,49%	708.000	99,49%	Sisa dan Belanja Penggantian
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	6.500.000,000,00	87,31%	909.905.633	87,31%	Sisa ketelitian anggaran cadangan gaji pegawai (sensus) dan Pegawai Tetap ada 5 yang pensiun dan 2 mutasi
4	Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Hewan Ternak	75.000.000	75.000.000	100,00%	75.275.880,00	100,36%	320.200	100,98%	Sisa dan sisa stok
5	Sewa dan Pemeliharaan Perantara Usung	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Pembelian PMK dan Asuransi Angkut Bina Perikanan Pro. 2021
6	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kenderaan	68.000.000	68.000.000	100,00%	60.190,370,00	88,50%	4.808.730	92,66%	Sisa dan sisa stok
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00%	9.687,080,00	96,86%	12.000	99,98%	Penyediaan sesuai dengan RAB Anggaran
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	18.000.000	18.000.000	100,00%	12.781,680,00	71,00%	1.218.400	81,88%	Sisa dan Belanja Penggantian
9	Penyediaan Bahan Material	30.000.000	30.000.000	100,00%	26.334,270,00	87,78%	465.731	97,56%	Sisa dan sisa stok
10	Pengembangan Ruang Koordinasi dan Komunikasi BPD	100.000.000	100.000.000	100,00%	68.200,084,00	68,20%	61.594.206	61,59%	Sisa karena Menyesuaikan hasil anggaran
11	Penyediaan Jasa Konsultasi, Standar Daya Air dan Listrik	60.000.000	60.000.000	100,00%	46.759,421,00	77,76%	11.249.579	81,27%	Sisa dan belanja layanan internet bayar ke Telkom di Dinas Kearsifan
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000	100.000.000	100,00%	104.662,680,00	104,66%	107.200	104,91%	Penyediaan sesuai dengan RAB Anggaran
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ruang Pemukiman, Jalan, dan Perbaikan Fasilitas dan Operasional alat Lapangan	100.000.000	100.000.000	100,00%	68.770,170,00	68,77%	18.229.827	81,87%	Sisa dan belanja pagar tembokan rumah masyarakat dan perbaikan dan biaya pemeliharaan pagar tembokan
14	Pemeliharaan Perawatan dan Biaya Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00%	9.490,080,00	94,90%	349.200	94,90%	Sisa dan Belanja Penggantian
15	Pemeliharaan Perawatan Gedung Kantor dan Rengas dan Lainnya	47.000.000	47.000.000	100,00%	33.517,080,00	71,31%	13.353.000	72,18%	Sisa dan Belanja upah Tukang
16	Pengadaan Logistik Kebutuhan dan Kebutuhan Lain untuk Dukung dan Peningkatan, Peningkatan Perawatan, dan Peningkatan	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00%	1.244.820,640,00	103,73%	52.179.950	103,13%	Sisa dan Belanja Jasa Tenaga Pemukiman (Gaji THU)
17	Pendekatan atau Gangguan Kemandirian dan Kemandirian Usaha Berusaha Perikanan dan Perikanan lainnya Perikanan dan Perikanan Liris, Rona dan Rona dan Rona	1.030.000.000	1.030.000.000	100,00%	867.930,080,00	83,30%	163.300.000	82,50%	Sisa dan Belanja Penggantian dan Dinas dalam kota (Naktu PAK Cams 3 bulan)
18	Koordinasi Pengembangan Kemandirian dan Kemandirian Usaha serta Peningkatan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3.850.000.000	3.850.000.000	100,00%	3.879.784,080,00	100,00%	778.298.000	100,00%	Sisa dan Belanja Jasa Tenaga Pemukiman (TAM, PAM dan Lainnya)
19	Penyediaan Perawatan dan Kemandirian dalam rangka Kemandirian dan Kemandirian Lainnya	200.000.000	200.000.000	100,00%	170.844,580,00	85,42%	28.354.500	85,32%	Sisa dan Belanja Penggantian dan Dinas dalam kota (Naktu PAK Cams 3 bulan)
20	Pengadaan Kebutuhan 3-D (Sewa, Peralatan, Personalia dan Sistem Peningkatan Masyarakat) termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berusaha Hal-hal Lainnya	1.75.000.000	175.000.000	100,00%	142.582,080,00	81,46%	32.408.000	81,46%	Sisa dan Belanja Penggantian dan Dinas dalam kota (Naktu PAK Cams 3 bulan)
21	Kunjungan antar Lembaga dan Kemandirian dalam rangka Peningkatan dan Peningkatan Gangguan Kemandirian dan Kemandirian Lainnya	210.000.000	210.000.000	100,00%	197.183,080,00	93,90%	28.817.000	93,90%	Sisa dan Belanja Makanan dan Minuman karyawan upang
22	Sewa dan Pemeliharaan Perawatan Daerah dan Peningkatan Ruang/Tempat	2.500.337.877	2.500.337.877	100,00%	1.724.141,690,00	72,95%	641.248.258	72,95%	Sisa dan anggaran DBHCHT (Jarak Cams 3 bulan)
23	Pengadaan 3-D (Sewa, Peralatan, Personalia dan Sistem Peningkatan Masyarakat) termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berusaha Hal-hal Lainnya	300.000.000	300.000.000	100,00%	133.780,080,00	44,60%	66.223.000	66,60%	Sisa dan Belanja Penggantian dan Dinas dalam kota (Naktu PAK Cams 3 bulan)
24	Peningkatan atau Peningkatan Perawatan Daerah dan Perawatan Ruang/Tempat	1.010.320.000	1.010.320.000	100,00%	426.085,880,00	42,17%	981.261.408	42,17%	Sisa dan anggaran DBHCHT (Jarak Cams 3 bulan)

- A.6 Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efesien Dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN** Indeks Profesionalitas ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman dengan data Tahun 2021 dengan target sebesar 73,4 dengan capaian sebesar 67,41 dikarenakan
1. Masih rendahnya tingkat kompetensi personil
  2. Kurang pelaksanaan dan keikutsertaan personil dalam mengikuti pelatihan dengan pola 20 jam pelajaran.
  3. Data IPS ASN terlampir

**Listing Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021  
Pemerintah Kab. Mojokerto**

Kondisi tanggal : 10-06-2022

IP ASN Perangkat Daerah : 67,41 (Rendah)

NO.	NIK	NAMA PNS (TAMPA GELAR)	MAJLIS	JANGKAWAHL	KOMPETENSI	KERJAS	DISIPLIN	MELAI	KATEGORI	PE BANGKIT DAERAH
1	191302 281001 021001	HERYO VENDI BRIDHANTO	Polisi	22	60	25	9	80	Tinggi	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
2	191701 021001 021001	HENOW DOO WIRAMAS	Polisi	22	40	25	9	80	Tinggi	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
3	191701 181001 021001	HERI SUWANTORO	Jabatan Struktural	22	40	25	5	85	Tinggi	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
4	191701 291001 021001	HIDAYAT PRAWONOGORO	Jabatan Struktural	22	40	25	5	85	Tinggi	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
5	180801 052001 121001	MUCHAMMAD AFPARTO	Jabatan Struktural	20	60	25	9	80	Tinggi	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
6	190601 181001 021001	PRIFANNOE WALYU ATMED	Jabatan Struktural	22	60	25	9	80	Tinggi	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
7	191701 181001 021001	RODHAN PURWANTO	Jabatan Struktural	20	50	25	9	80	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
8	191701 021001 021001	ADYWARUDI	Polisi	5	40	25	5	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
9	180801 182001 121001	SHAFID ZANIL HAKIM	Jabatan Struktural	20	25	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
10	180801 291001 121001	AMRI MULYENI	Polisi	5	60	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
11	190401 021001 021001	ALHAMDILAH KHOLIMAN	Polisi	5	40	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
12	191701 021001 021001	ANANG ASHAF	Polisi	5	40	25	5	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
13	190601 282001 121001	ANANG PRANEDJA	Polisi	5	40	25	5	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
14	190201 292001 021001	ANWAR	Polisi	5	40	25	5	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
15	191701 122001 021001	ARISONG	Polisi	5	60	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
16	191701 182001 122001	ASAS PR WULANDARI	Polisi	9	60	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
17	180801 021001 021001	AGUS	Polisi	5	60	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
18	191701 172001 021001	HAZI MANSURTO	Polisi	5	60	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
19	180201 082001 021001	HERMANTO	Polisi	5	40	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
20	190401 022001 021001	IMANAN	Polisi	5	40	25	5	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
21	180301 182001 021001	IRAMA AMIN NANAN	Polisi	9	60	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
22	191701 152001 021001	MUCHAMMAD RIZKI	Jabatan Struktural	22	60	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA
23	190201 081001 021001	MUHAMMAD ABDULACH KHORUSDI	Polisi	5	40	25	9	75	Cedang	SATLHAM POLISI PAMONG PRAJA



24	197301 142007 011006	MULYONO	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
25	198211 290008 011016	MIRAS WISAWATI	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
26	197003 152006 041005	RAWI	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
27	197808 202005 011006	MUDIARUS MUSLIM	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
28	196612 051008 031006	RUEHAENI	Jabatan Struktural	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
29	197111 143008 011004	SARUL MURSID	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
30	196909 172016 011003	NAMSUL MA ARIF	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
31	196408 101592 031005	SARTONO, S	Jabatan Struktural	20	25	25	3	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
32	197103 042007 011007	SUKENI DWILESTAR SUNYOTO	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33	197302 072007 011005	SUPERNO	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
34	198201 082008 011011	SUTAN SUJAMTO	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35	197406 123007 011021	WYONO	Pelaksana	5	40	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
36	196606 213590 031006	ZARI	Jabatan Fungsional	20	25	25	5	75	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
37	197407 142007 011016	AGUSIAS YAGIN	Pelaksana	1	40	25	5	71	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
38	197203 222008 011004	DAJARNITO	Pelaksana	1	40	25	5	71	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
39	196205 102008 011024	MIDH. ISA ANSORI	Pelaksana	1	40	25	5	71	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
40	198002 071009 011003	WAWU BAGUS ANAM SUKAWA	Pelaksana	1	40	25	5	71	Sedang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
41	196711 073007 011011	ISAM BAKORI	Pelaksana	5	40	25	5	69	Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
42	196207 172001 121001	SUDHAWANTO	Pelaksana	25	17,5	25	5	68	Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
43	197908 041906 101001	EDDY TAUPRI	Jabatan Struktural	39	15	29	3	80	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
44	198812 212005 081002	HERYANTO	Pelaksana	5	22,5	29	5	58	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
45	196904 072009 061002	SORIM HARONO	Pelaksana	5	22,5	25	5	58	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
46	197601 022008 011015	KURNIANTO	Pelaksana	5	17,5	25	5	53	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
47	198504 143007 011005	PTONO AS	Pelaksana	5	17,5	29	3	55	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
48	197110 022010 011004	PURNANTO	Pelaksana	5	17,5	29	5	53	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



49	196608 252007 011020	ROHMAD Hidayat	Pelaksana	5	17,5	25	5	58	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
50	196909 082007 011020	WARDYO	Pelaksana	5	17,5	25	5	38	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
51	196911 212008 011006	TRI SAWITOSO HARYADI	Pelaksana	1	17,5	35	5	40	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
52	197407 262008 011005	ANKUS JAMBRA	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
53	196710 012007 011025	ASPIH ANWAR	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
54	196903 512009 041004	BULAN	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
55	196710 072007 011019	DJAFAR HUDA ANSHARY	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
56	197901 062010 011004	HADI SUYONO	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
57	196002 252008 011006	HIDAYAT HALIM AL FIRI	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
58	196911 082007 011020	SUDAMMAN	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
59	197403 052008 011025	SYAMSUDIN	Pelaksana	5	0	25	5	35	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
60	196503 262002 121002	SUYADI	Pelaksana	1	0	25	5	31	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
61	197209 122008 011018	SYAMSIAL HEDYAT	Pelaksana	1	0	25	5	31	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
REKAP ASN				700	30,58	24,84	5,00	67,41	Rendah	

### A.7 Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efesien Dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indikator kinerja reformasi birokrasi perangkat daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 62 akan tetapi capaian realisasinya sebesar 67,27 hasil penilai Tim Reformasi Birokrasi terlampir.



**HASIL PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH & BAGIAN DI SETDA TAHUN 2022**

No	Perangkat Daerah/Bagian	Pengungkit (36,30)	Hasil (63,70)	Indeks RB	Kategori
31	DPUPR	25.55	45.74	71.29	BB
32	Bagian Umum	25.70	44.63	70.33	BB
33	Disperindag	34.45	35.33	69.78	B
34	Bappeda	25.54	43.71	69.25	B
35	Dinas Pangan dan Perikanan	30.90	38.35	69.25	B
36	kec Kutorejo	22.90	46.32	69.22	B
37	Kec Pacet	34.76	34.09	68.85	B
38	Bagian Hukum	30.44	38.35	68.79	B
39	Kec Jetis	24.78	43.47	68.25	B
40	Kec Sooko	30.19	37.92	68.11	B
41	Satpol PP	32.59	34.68	67.27	B
42	Bagian Perekonomian	30.75	36.12	66.87	B
43	Setwan	31.68	34.18	65.86	B
44	Dinas Sosial	29.34	34.90	64.24	B
45	Kec Gondang	32.36	30.27	62.63	B

**A.8 Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 yang sudah diperjanjikan sebesar 83,4 (A) akan tetapi capaian realisasinya sebesar 80,76 (A) dikarenakan

1. data pendukung yang disampaikan sudah dicukupi akan tetapi pada IP ASN masih rendah
2. belum semua ASN menyusun laporan kinerja
3. Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektort terlampir





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**INSPEKTORAT**

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188  
Website : [www.inspektorat.mojokertokab.go.id](http://www.inspektorat.mojokertokab.go.id)

---

LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022

---

Nomor : 705/2382/416-060/2022  
Tanggal : 06 September 2022  
Lampiran :-

---

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dan diperoleh Nilai AKIP **80,76** dengan predikat **A (Memuaskan)**.
  2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah :
    - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
    - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
    - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
    - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
    - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
  3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (Empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
    - a. Perencanaan Kinerja;
    - b. Pengukuran Kinerja;



- c. Pelaporan Kinerja;  
 d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien ( <i>reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 – 30	<b>Sangat Kurang</b>

			Sistem dan latanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perhatian/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
--	--	--	--

5. Pencapaian predikat A (Memuaskan), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	26,58
b. Pengukuran Kinerja	30,00	27,28
c. Pelaporan Kinerja	15,00	11,50
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,40
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>80,76</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

**a. Perencanaan Kinerja**

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,58** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

**1) Sub Komponen Keberadaan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yaitu, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi (Renaksi), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK).

**2) Sub Komponen Kualitas**

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto secara umum telah memenuhi standar yang baik yaitu, telah diformalkan,

indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART, selaras di setiap level (*cascading*) dan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) namun dokumen perencanaan belum menyajikan penetapan target nasional/propinsi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja bulanan

### 3) Sub Komponen Implementasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran namun pemanfaatan dokumen perencanaan belum sepenuhnya dilakukan antara lain penetapan anggaran belum sepenuhnya menyajikan target kinerja yang ingin dicapai dan renaksi yang telah memuat target belum dipantau capaian kinerjanya secara berkala

## b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja, serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,28** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### 1) Sub Komponen Keberadaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja antara lain SOP pengukuran kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja.

### 2) Sub Komponen Kualitas

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Data capaian kinerja telah disajikan, namun belum terdapat bukti contoh data kinerja yang dikumpulkan dan olah data kinerja

### 3) Sub Komponen Implementasi

Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment namun belum sepenuhnya mempengaruhi strategi, kebijakan dan aktivitas pencapaian kinerja. Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja antara lain belum adanya tindak lanjut unit/satuan kerja/pegawai terhadap pembenahan yang harus dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

### c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

#### 1) Sub Komponen Keberadaan

Dokumen Laporan Kinerja tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto telah disusun, diformalkan, direviu, dan dipublikasikan.

#### 2) Sub Komponen Kualitas

Dokumen laporan kinerja yang disusun masih belum memenuhi standar, hal ini terjadi karena belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional.

#### 3) Sub Komponen Implementasi

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan namun dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, belum terdokumentasikan dengan cukup baik.

### d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi kinerja internal, kualitas pelaksanaan, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja.

internal tersebut, serta pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2021. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **15,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

**1) Sub Komponen Keberadaan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto telah memiliki pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal berupa SOP namun evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pimpinan sampai jabatan fungsional/staf.

**2) Sub Komponen Kualitas**

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan dengan SDM yang memadai dan menggunakan teknologi informasi namun belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja.

**3) Sub Komponen Implementasi**

Secara umum terdapat peningkatan Implementasi SAKIP dengan adanya peningkatan nilai SAKIP dalam tiga tahun terakhir, sehingga memberikan dampak yang nyata dalam efektifitas dan efisien kinerja, namun belum terdokumentasikan secara memadai.

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :
- a. Menetapkan target nasional/propinsi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja bulanan pada dokumen perencanaan kinerja.
  - b. Melaksanakan pemantauan atas target capaian kinerja yang telah disajikan pada renaksi secara berkala dan terdokumentasikan
  - c. Melakukan pengukuran kinerja sampai ke individu staf, yang dibuktikan dengan laporan kinerja masing-masing individu
  - d. Mendokumentasikan strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya berdasarkan hasil pelaporan kinerja
  - e. Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang mulai dari pimpinan sampai jabatan fungsional/staf
  - f. Meningkatkan peran aktif pimpinan dan atasan masing-masing pegawai untuk mendorong semua pegawai mengoptimalkan implementasi SAKIP sehingga

dapat terbentuk persamaan persepsi bahwa SAKIP tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen tetapi memerlukan langkah nyata dan kerjasama dari semua level individu untuk mewujudkan perangkat daerah yang lebih akuntabel

Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mengetahui,  
INSPEKTUR  
KABUPATEN MOJOKERTO



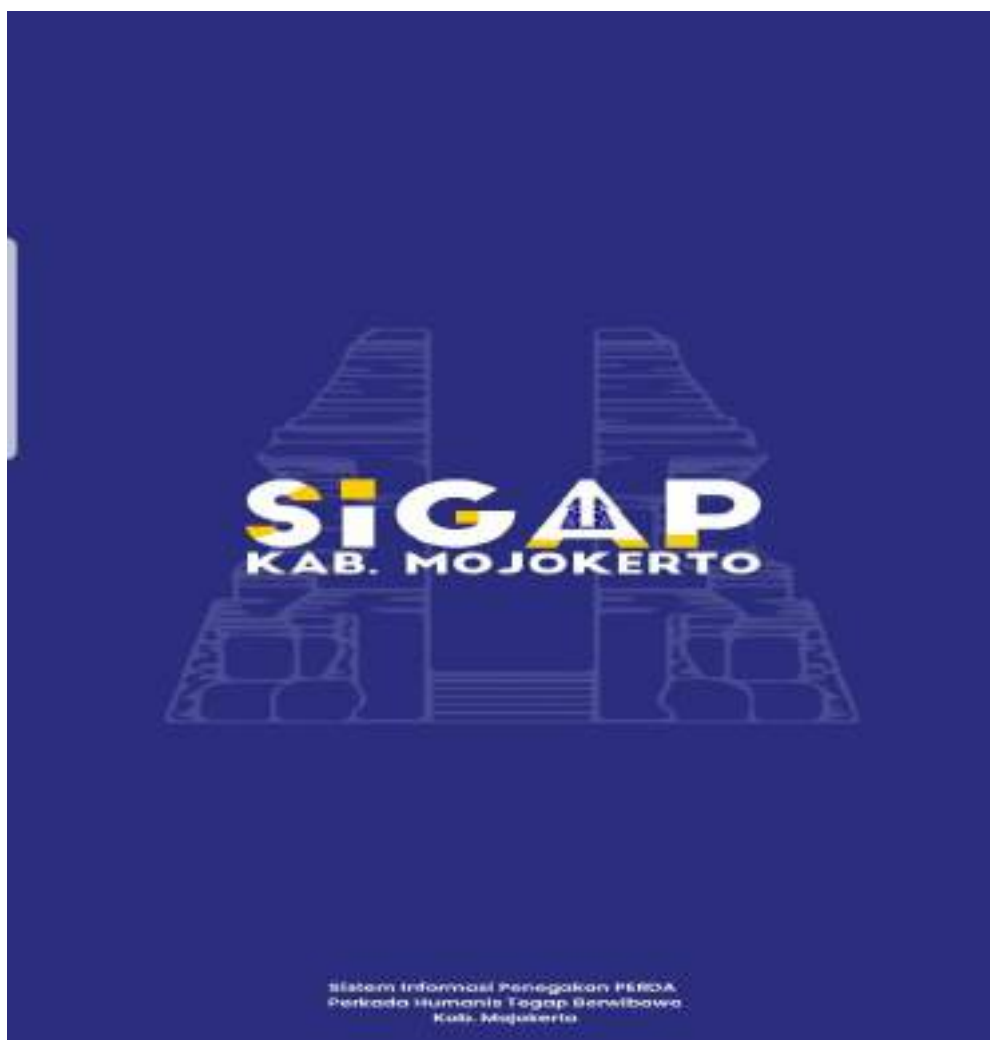
Drs. POEDJI WIDODO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700425 199003 1 006

Tim Evaluator :

1. ABDUL MU'IS, SH  
NIP. 19751121 199703 1 003
2. EDI YUNI PUSPASARI, ST., M.M  
NIP. 19770617 200501 2 011
3. M CHOIRUDDIN EKA B N, SE  
NIP. 19960923 201903 1 008
4. YANUARISKA ERVINAYANTI, S.A  
NIP. 19910130 201903 2 010

**A.9 Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan Indikator Kinerja Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**

Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi sejumlah 1 inovasi dengan aplikasi SIGAP (Sistem Penegakan Perda dan Perkada) yang pengoperasiannya melalui media web site dan hand phone sebagai bentuk laporan dan tindak lanjutnya ada tim lapangan yang dibentuk untuk menangani sesuai dengan pelanggarannya.



**SIGAP**  
KAB. MOJOKERTO

Hallo, HARYO VENDY BRAHMANTYO, S.ST !

+ BUAT LAPORAN

## Riwayat

09 February 2023, 12:39  
Pati  
**Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat**  
Melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerawutan, tidak tertibnya lingkungan dan m...

09 February 2023, 12:38  
Pati  
**Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat**  
Melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerawutan, tidak tertibnya lingkungan dan m...

09 February 2023, 12:37  
Mojokerto  
**Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat**  
Melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerawutan, tidak tertibnya lingkungan dan m...

09 February 2023, 12:36  
Mojokerto  
**Jenis Pelanggaran**  
Melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerawutan, tidak tertibnya lingkungan dan m...

09 February 2023, 12:35  
Pati  
**Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat**  
Melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerawutan, tidak tertibnya lingkungan dan m...

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung oleh dana yang memadai, baik jumlah maupun kelancaran pencairannya.

Pada tahun 2022 sumber dana Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan setelah Perubahan Anggaran (PAPBD) Tahun 2022 yang berjumlah Rp 17.902.330.515,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang / Jasa dan Belanja Modal sedangkan realisasinya sebesar Rp. 14.451.220.214,- dengan capaian realisasi sebesar 80,72%.

Berikut capaian realisasi anggaran kegiatan dan kinerja selama tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Rp)	Realisasi Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Rp)	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui sosialisasi, pengawasan, penanganan, penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan terhadap para pelanggar Perda dan Perkada  Meningkatkan Pencegahan, deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, pelaksanaan patrol, penindakan atas gangguan Trantibunmas dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase indikator program yang tercapai	8.060.622.338	6.997.515.343	90%	87%	Rencana program yang sudah tersusun pelaksanaannya berbenturan dengan program kerja selain dari Perangkat Daerah Belum adanya kesamaan satuan pengukuran indikator	mengoptimalkan penyusunan rencana program dengan mempertimbangkan program kerja selain dari perangkat daerah  mengoptimalkan verifikasi terkait satuan pengukuran indikator	



<b>A</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.762.000</b>	<b>7 dok</b>	<b>7 dok</b>			
1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000		7 dok	7 dok			
2					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	0	7 dok	7 dok			
<b>B</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan</b>	<b>7.322.022.338</b>	<b>6.393.096.806</b>	<b>14 data</b>	<b>14 data</b>			
3					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.379.788.338	6.393.096.806	14 data	14 data			
<b>C</b>					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselesaikan</b>	<b>75.600.000,-</b>	<b>75.278.800</b>	<b>1 data</b>	<b>1 data</b>			
4					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.600.000	75.278.800	130 stel	130 stel			
<b>D</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan</b>	<b>270.000.000</b>	<b>181.599.343</b>	<b>5 data</b>	<b>5 data</b>			
6					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	60.190.270	13 unit	13 unit			
8					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.987.500	10 kali	10 kali			
9					Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan	15.000.000	13.781.600	1 pake	1 pake			



					dan Penggandaan	Penggandaan			t	t		
10					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	30.000.000	29.334.279	1 paket	1 paket		
11					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	68.305.694	688 OH	665 OH	pembatasan terkait rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah karean dampak Covid 19	Mengevaluasi pagu anggaran sehingga target indikator dapat menyesuaikan
<b>F</b>					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.000.0000</b>	<b>203.622.221</b>	<b>2 data</b>	<b>2 data</b>		
15					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.000.000	124.143.800	12 bulan	12 bulan		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.000.000	154.862.800	120 OB	120 OB		
<b>G</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>163.000.000</b>	<b>130.156.173</b>	<b>3 data</b>	<b>3 data</b>		
17					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.000.000	86.779.173	22 unit	22 unit		
18					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.460.000	28 unit	28 unit		
19					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	47.000.000	33.917.000	1 unit	1 unit		



					Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
II					<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase peanggaran indikator program yang tercapai</b>	<b>9.841.708.177</b>	<b>5.779.806.139</b>	<b>90%</b>	<b>87%</b>	<b>Rencana program yang sudah tersusun pelaksanaannya berbenturan dengan program kerja selain dari Perangkat Daerah - Belum adanya kesamaan satuan pengukuran indikator</b>	<b>mengoptimalkan penyusunan rencana program dengan mempertimbangkan program kerja selain dari perangkat daerah  - mengoptimalkan verifikasi terkait satuan pengukuran indikator</b>		
H					<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.266.000.000</b>	<b>3.921.884.500</b>	<b>6 data</b>	<b>6 data</b>				
20					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.295.000.000	1.244.829.840	120 kali	142 kali				
21					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	1.030.000.000	847.700.000	177 kali	186 kali				



					Rasa dan Kerusuhan Massa	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						
22					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3.350.000.000	2.573.764.000	556 3 oran g	657 0 oran g		
23					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	200.000.000	170.645.500	224 oran g	274 oran g		
24					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	175.000.000	142.592.000	200 oran g	290 oran g		
25					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	216.000.000	187.183.000	60 oran g	60 oran g		
I					<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan</b>	<b>Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan</b>	<b>3.575.708.177</b>	<b>2.304.990.585</b>	<b>3 data</b>	<b>3 data</b>		



					<b>Bupati/Wali Kota</b>	<b>Bupati/Wali Kota</b>						
27					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.365.387.877	1.724.141.639	22 kali	28 kali		
28					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.000.000	133.780.000	102 kali	105 kali		
29					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.010.320.300	429.068.892	37 kali	40 kali		



### C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diperoleh kebijakan dalam menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya. Pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tenang dan kondisi tertib dengan indikator program/kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dalam tabel 3.7 yang diperoleh permasalahan-permasalahan yang signifikan yaitu penyerapan realisasi anggaran program ini masih kurang maksimal karena dampak dari covid 19 juga adanya anggaran yang terkena refofusing dan silfa karena sisa kontrak dan efisiensi belanja yang belum maksimal penyerapannya.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan (lihat tabel 3.7) dengan total anggaran sebesar Rp. 8.060.622.338,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.997.515.343,- dengan realisasi target 86,81% penyerapan anggaran masih kurang maksimal karena dampak covid 19 dan perlu dilaksanakan dengan maksimal karena program ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 2 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan (lihat tabel 3.7) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.841.708.177,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.779.806.139,- dengan realisasi target 58,72% penyerapan anggaran masih kurang maksimal karena dampak covid 19 dan perlu dilaksanakan dengan maksimal karena program ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas.

### D. RENCANA DAN TINDAK LANJUT

Dalam Kebijakan Strategis yaitu menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi penyelidikan,



penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya dengan Dasar Hukum Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat mencapai tujuan dan masalah dapat terselesaikan dengan meningkatkan upaya Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tenang dan kondisi tertib juga diharapkan dapat mencapai tujuan dan masalah dapat terselesaikan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kendala demi mewujudkan capaian sasaran program maupun kegiatan yang ditunjukkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian program/kegiatan/Sub Kegiatan tersebut tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto 2021-2026. Hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya.



**F. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG****RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG** Laporan kurang baik Laporan sudah baik Laporan diteliti ulang Realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang Lain-Lain

.....

.....

.....



## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dibuat dan disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja, pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang aman, tertib dan kondusif.

Mojokerto, Pebruari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
KABUPATEN MOJOKERTO



**EDDY TAUFIQ, S.STP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197908041998101001